

## Titik Api Mulai Terlihat di Lahan Gambut

YOGYAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya Bakar mengatakan titik api yang ada di sejumlah lahan gambut mulai terlihat menjelang musim kemarau ini. Ada 29 titik api dan ini jauh berkurangan dibandingkan tahun 2015 lalu.

"Kali ini sebagian besar dilakukan warga yang ingin membuka lahan atau kepentingan lain sedangkan pembakaran yang dilakukan perusahaan sudah jauh berkurang, hanya satu atau dua perusahaan yang diduga masih melakukannya," ungkap Menteri usai membuka Seminar dan Rakernas MLH PP Muhammadiyah bertema "Selamatkan Lingkungan Melalui Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama" di kampus UMY, akhir pekan lalu.

Ia menegaskan, pemerintah tidak main-main dalam menegakkan aturan terkait pembakaran lahan. Setelah para pengusaha dan perusahaan yang mengakibatkan kebakaran lahan diproses secara hukum, kini situasinya jauh berbeda. Apalagi pemerintah berencana mengeluarkan moratorium pembukaan lahan sawit.

Pembakaran yang masih dilakukan warga setempat menurutnya ada beberapa sebab antara lain membuka lahan atau untuk memperoleh pupuk. Pihaknya akan melakukan pendekatan kemanusiaan pada warga dan memberi solusi agar tak ada lagi pembakaran lahan.

### Dalam Proses

Mengenai rencana moratorium lahan sawit, Menteri mengatakan masih dalam proses penilaian. Pihaknya melibatkan banyak pihak untuk melakukan kajian, evaluasi dan lainnya mengenai perkebunan sawit. Ia tidak ingin ada pihak yang merasa dirugikan apalagi sudah ada pendapat dari para pengusaha terkait moratorium tersebut.

"Mereka yang terkait usaha sawit, para pengusaha, masyarakat sekitar perkebunan ingin seera melihat bagaimana bentuk moratorium. Tapi sabarlah, yang jelas kami sedang mengkaji dan kebijakan nantinya pun juga tidak asal-asalan. Presiden memerintahkan agar perlu kajian mendalam," tandas Siti Nurbaya.

Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan kebijakan moratorium reklamasi pantai di kawasan Jakarta. Langkah tersebut dilakukan supaya pengembangan mengevaluasi dan melangkapi perizinan termasuk Amdal. Ia mengatakan kalau memang seluruh perizinan tidak ada masalah, proyek bisa jalan terus. Lain halnya kalau kemudian ada temuan ternyata tidak sesuai perizinan, pemerintah akan langsung mencabut izin kegiatan reklamasi.

"Soal pencabutan ada prosesnya tak bisa begitu saja. Jadi periksa dulu, dibuat berita acara, pemerintah tanda tangan kontraktor tanda tangan baru diberi surat keputusan dihentikan pelaksanaan proyek tersebut karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor. Begitu prosesnya kalau nantinya akan dihentikan," ujarnya. (D19-87)